



Mkt



MENEGAKKAN RASA KEADILAN

Wacana penataan kembali sistem PPN menimbulkan gejolak. Skema baru disusun justru demi menegakkan rasa keadilan dalam sistem pajak. Dari rakyat, dan akan kembali ke rakyat.

Daftar Isi

APBNKITA

04 Realisasi APBN 2021

DARI LAPANGAN BANTENG

05 Gotong Royong yang Berkeadilan

PHOTO STORY

06 Gudang Lelang Dagang Ikan

LAPORAN UTAMA

08 Jaga Prinsip Netralitas, Hindari Distorsi
Ekonomi

10 Cipta Rasa Keadilan

12 Infografik

GENERASI EMAS

14 Beraksi Dengan Konservasi Ikan

POTRET KANTOR

16 Merawat Sukacita di Yamdena

TEKA-TEKI

18 Teka Teki Juli Edisi Minggu Pertama



Foto Cover iStock

COVER STORY:

KEM-PPKF Tahun 2022 merupakan dokumen kerangka arah kebijakan ekonomi makro untuk tahun 2022. Pada cover edisi ini, kami menggunakan foto daging wagyu. Daging wagyu merupakan salah satu contoh barang konsumsi premium yang kemungkinan akan dikenakan PPN untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Pusparasi. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budiando Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Pendapatan Negara

Rp726,4 triliun

Belanja Negara

Rp945,7 triliun

(Rp67,55) triliun

Keseimbangan Primer

(Rp219,3) triliun

Surplu/(Defisit) Anggaran

Pembiayaan Anggaran

Rp309,3 triliun

Gotong Royong Yang Berkeadilan

Mungkin sebagian dari kita sudah akrab dengan istilah *ngemong*. Ya, kata *ngemong* berasal dari bahasa Jawa yang bermakna “mengasuh”. Dalam sebuah keluarga, lazimnya orang tua mengasuh anak-anaknya, atau kakak mengasuh adiknya. Termasuk dalam tugas *ngemong* ini adalah mendidik, mengawasi, mendorong sikap gotong royong, dan berbuat adil. Berbuat adil memang tak gampang. Adil juga tak melulu hanya soal sama rata, sama besar. Adil membutuhkan tindakan lebih dari itu. Sikap adil seperti itulah yang kini tengah diupayakan pemerintah melalui usulan perubahan undang-undang pajak yang diajukan ke wakil rakyat.

Aspek keadilan dan gotong royong ingin ditonjolkan pemerintah dalam skema penataan ulang sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak awal, tujuan pemerintah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan sebagai wujud dari sikap *ngemong* kepada masyarakat, baik yang kurang mampu maupun yang berpenghasilan tinggi. Penerapan tarif yang tak sama untuk barang yang bersifat mewah dan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat banyak diharapkan lebih dapat menggambarkan rasa keadilan. Undang-undang yang saat ini berlaku masih memberlakukan barang strategis tidak dikenakan pajak. Maka ketentuan inilah yang dirasa perlu diubah.

Terlebih, saat ini APBN juga menjadi tumpuan penanganan pandemi

COVID-19. APBN dalam hampir satu setengah tahun ini telah bekerja sangat keras dengan menjadi bantalan bagi masyarakat terdampak pandemi. Tentu penyehatan APBN juga perlu dilakukan agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kebijakan penataan sistem PPN ini juga merupakan bagian dari upaya menyehatkan APBN. Harapannya, kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan pajak bagi masyarakat mampu dan kemudian pajaknya akan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Proses pengusulan perubahan undang-undang ini tentu membutuhkan dukungan masyarakat. Tentu saja dalam pembahasannya nanti, masukan dan pendapat publik terus kami harapkan. Selamat membaca!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Gudang Lelang Dagang Ikan

Teks Anas Nur Huda Foto Nur Iman

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang atau biasa disebut Gudel oleh warga setempat berlokasi di Teluk Betung, Bandar Lampung. Sebagian lokasi tempat pelelangan ikan berada tepat diatas air. Bagi penggemar makanan sea food, datang ke TPI Gudel merupakan suatu keharusan, karena segala jenis hewan air laut segar dapat kita beli dengan harga yang relatif lebih murah seperti udang, kepiting, cumi-cumi, ikan teri, ikan tongkol, ikan tenggiri dan sebagainya. Aktifitas pasar ikan mulai ramai pada jam 3 hingga 6 sore. Sedangkan pada malam hari area masuk ke Gudang Lelang kian ramai oleh para penjaja kuliner ikan.



Jaga Prinsip Netralitas, Hindari Distorsi Ekonomi

Teks: Dera Hasprantunilla Foto: iStock

Belakangan ini, diskursus publik diwarnai oleh topik rencana kebijakan menyesuaikan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Mayoritas masyarakat tergiring pada opini bahwa pemerintah seolah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil di masa pandemi ini. Padahal, salah satu tujuan dari langkah pemerintah menata PPN adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya dikenakan atas barang dan jasa tanpa memperhatikan kemampuan pembayar pajaknya. Sebagai pajak atas konsumsi, skema PPN tidak melihat siapa yang mengonsumsi barang dan jasa tersebut dan kemampuan mereka membayar. Jadi, masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah sama-sama membayar pajak dengan nominal yang sama atas konsumsi barang dan jasa yang sama.

“Sekarang pertanyaan saya begini, andaikata tidak dikenakan apakah mencerminkan keadilan? Ternyata tidak juga. Prinsipnya begini, pajak itu seharusnya dikenakan pada ke orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi atau kelompok orang kaya. Namun, jika barang dan jasa ini tidak dikenakan maka mereka jadinya tidak bayar pajak, kan begitu. Jadi, dikenakan atau tidak dikenakan atas sembako ini, masing-masing mempunyai isu ketidakadilan. Saya berpandangan, lebih baik tetap dikenakan, tetapi nanti hasil pajak yang dipungut didistribusikan kembali kepada mereka yang terkena dampak pengenaan PPN ini,” ujar Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center.

Kedua, PPN adalah jenis pajak yang ditujukan kepada konsumen akhir, tetapi pengusaha diminta untuk memungut pajaknya. Dengan demikian PPN bersifat pajak tidak langsung. Untuk itu, para pengusaha ini harus memiliki mekanisme pajak keluar pajak masukan (PKPM). Artinya, pengusahanya hanya membayar selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Inilah yang disebut netralitas PPN.

“Nah, jika ada satu jenis barang atau jasa yang dikecualikan dari PPN pada rantai produksi atau distribusi, maka ini akan merusak mekanisme PPN. Saat ada pajak masukan itu penyerahannya

← APBN adalah dana anggaran yang berasal dari masyarakat melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta akan kembali lagi kepada masyarakat.

tidak dikenakan PPN artinya pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kemudian, ada dua pilihan yang akan diambil pengusaha yakni mengurangi marjin labanya atau dibebankan pada harga pokok penjualan. Pilihan kedua menjadi opsi yang paling sering diambil sehingga otomatis harga naik. Makanya untuk netralitas tersebut harus seminimal mungkin barang-barang jangan dikecualikan dari objek PPN,” terang Darussalam

Menata sistem pemungutan PPN

Kebijakan penyesuaian sistem pemungutan PPN dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, hadirnya distorsi ekonomi karena adanya *tax insiden* sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Kedua, kurangnya rasa keadilan atas objek pajak yang sama yang saat ini dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda, namun sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN.

Darussalam menilai bahwa langkah pemerintah yang akan mengusulkan skema penataan PPN sudah tepat dan sesuai dengan konsep dasar PPN.

“Sejak PPN diperkenalkan untuk menggantikan pajak penjualan pada 1984, mekanisme PPN yang dibangun sudah disisipi banyak pengecualian sehingga tujuan PPN saat digulirkan pertama kali atau saat ini dibangun oleh para ahlinya itu sudah menyimpang. Saat ini, sepertinya pemerintah ingin membawa kembali dengan konsepnya sehingga berguna bagi penerimaan negara Indonesia,” jelas Darussalam.

Pemerintah sendiri berharap setidaknya ada empat dampak perubahan yang terjadi jika kebijakan ini nantinya diimplementasikan.

“Pertama, terkait dengan dampak ekonomi di mana kebijakan ini akan membawa kita pada satu mekanisme pemungutan pajak yang lebih efisien. Lalu terkait dampak sosial di mana nantinya masyarakat dapat menjangkau

layanan pemerintah lebih baik lagi dengan harga terjangkau. Terakhir, kita juga berharap kebijakan ini pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga *tax expenditure* ataupun hal-hal yang selama ini menjadi biaya bisa berkurang,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor dalam *media briefing* terkait isu PPN (14/6).

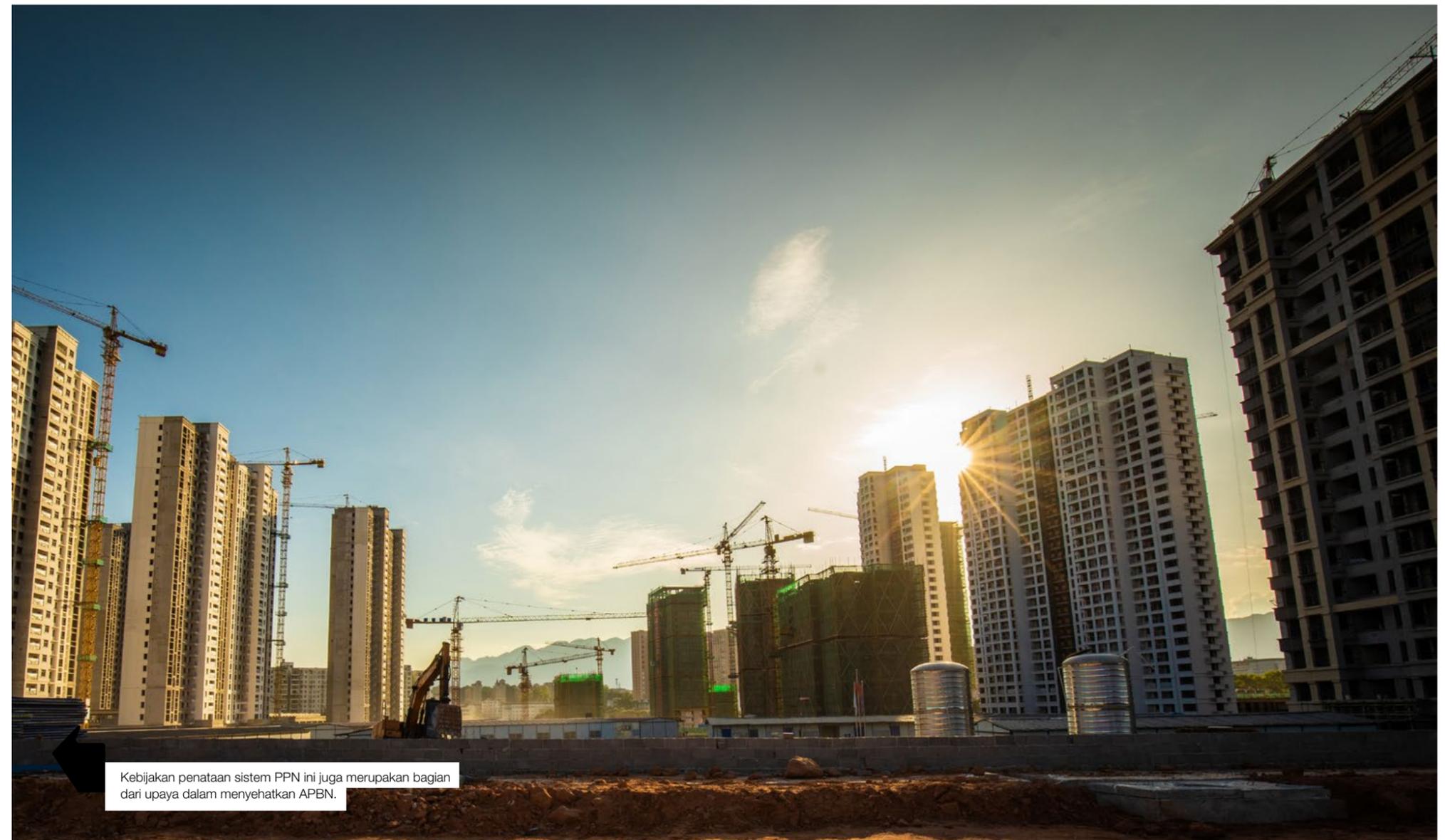
Beri kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawah

Kebijakan penataan sistem PPN ini juga merupakan bagian dari upaya dalam menstabilkan APBN. Selama ini, APBN sudah bekerja sangat keras untuk menjadi bantalan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Harapannya, kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan pajak bagi masyarakat mampu dan kemudian pajaknya akan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

“Di sinilah aspek keadilan dan gotong royong ditonjolkan. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak terutama bagi masyarakat ataupun bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi pajak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat memberikan kompensasi berupa subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah, seperti yang sudah dirasakan sebelumnya seperti subsidi listrik dengan batasan daya tertentu dan juga penyediaan tabung gas 3kg,” papar Neil.

Hal senada juga disampaikan oleh Darussalam. Menurutnya kebijakan PPN lebih baik dikenakan dan nanti hasil pajak yang dipungut dapat didistribusikan kepada mereka yang terkena dampak dari pengenaan PPN ini.

“Sederhananya seperti ini, misalnya potensi PPN atas sembako secara keseluruhan katakan 1000 potensi



pajaknya. Kontribusi yang tidak mampu kita kasih proporsi 30 persen, yakni Rp300. Sementara kontribusi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu itu 70 persen, yakni Rp700. Nah, Rp700 ini bisa didistribusikan kembali ke masyarakat tidak mampu. Daripada kita tidak kenakan sama sekali, maka negara kehilangan potensi pajak sebesar Rp1.000,” terang Darussalam.

Upaya merespons pandemi tanpa mendistorsi ekonomi

Menurut Darussalam, studi empiris

di banyak negara dalam hal pengenaan pajak di masa pandemi ini selalu diingatkan agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Pengenaan PPN ia nilai lebih tepat jika dibandingkan PPh karena sifatnya yang netral, skema yang sederhana, dan lebih mencerminkan ukuran ekonomi sebuah negara. Langkah pemerintah juga dinilai tepat karena sesuai dengan *international best practice* yang dilakukan di banyak negara berkembang yang ekonominya tidak berbeda jauh dengan Indonesia.

“Antara dua pilihan yakni PPh dan

PPN, yang sifatnya lebih netral dan tidak mendistorsi ekonomi adalah pengenaan atas PPN. Sebab, PPh semakin mudah disalahgunakan dengan fenomena penghindaran pajak dan juga semakin sulit menarik pajak dari PPh. Sehingga yang lebih gampang, lebih sederhana, dan mencerminkan *size* ekonomi suatu negara adalah PPN. Sekarang banyak negara mulai beralih dari PPh ke PPN karena jenis skema pemajakannya sangat sederhana. Maka dari itu, jangan dirusak dengan mekanisme atau skema pengecualian-pengecualian tersebut,”

tambahnya.

Senada dengan Darussalam, Neil menyampaikan bahwa beberapa negara menggunakan PPN sebagai salah satu instrumen untuk merespons pandemi COVID-19 ini agar penerimaan negara-negara yang bersangkutan optimal. Selain itu, dalam struktur penerimaan pajak Indonesia saat ini, penerimaan PPN cukup dominan yakni sekitar 42 persen dari total keseluruhan penerimaan.

Cipta Rasa Keadilan

Teks Reni Saptati D.I Foto iStock

Sejak merdeka, Indonesia menggunakan sistem perpajakan peninggalan kolonial Belanda. Kian lama, sistem itu kian usang. Penyempurnaan sistem perpajakan mulai dirintis ketika Menteri Keuangan Ali Wardhana menjabat pada awal pemerintahan Orde Baru. Gebrakan besar-besaran Ali lakukan pada tahun 1983 sewaktu ia berhasil menyelesaikan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang perpajakan. Pada saat itulah, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN di Indonesia terangkum dalam UU Nomor 8 Tahun 1983. Sejak diberlakukan, UU tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال mengungkapkan, PPN kemudian menjadi sangat kompleks karena dalam perjalanannya muncul banyak pengecualian dan fasilitas. “Setidaknya saat ini ada 4 kelompok barang yang tidak tergolong kelompok barang kena pajak. Kemudian ada 17 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Di samping itu, kita juga punya jenis-jenis fasilitas yang lain lagi: ada PPN

dibebaskan, ada PPN yang statusnya tidak dipungut, ada pula PPN dengan pengenaan dengan sistem tertentu. Itu membuat sistem PPN kita itu menjadi sangat kompleks,” jelasnya.

Pengecualian dan fasilitas tersebut memberikan berbagai dampak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun penerimaan negara. Dari sisi ekonomi, tercipta distorsi ekonomi, misalnya harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Pemungutan pajak pun menjadi tidak efisien sebab penataannya lebih kompleks.

“Administration cost dan compliance cost menjadi besar. Muncul juga berbagai ‘lubang’ karena terlalu banyak pengecualian,” tutur Yon yang menyelesaikan studi S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University pada 2007.

Dari sisi sosial, sistem PPN yang berlaku saat ini kurang memberikan rasa keadilan lantaran menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Mereka tidak perlu membayar pajak untuk konsumsi beras, ikan, daging, dan lainnya yang dikecualikan.

Dari sisi penerimaan, potensi penerimaan pajak menjadi berkurang karena *tax expenditure* cukup tinggi.

Yon mengakui PPN yang ada sekarang memiliki berbagai kelemahan. Oleh sebab itu, ia menegaskan dibutuhkan penataan kembali atas sistem PPN yang berlaku di Indonesia secara lebih komprehensif.

Demi keadilan

“Itu yang menjadi kata kunci sebenarnya. Kita menciptakan keadilan dan tidak semata-mata hanya penerimaan negara,” tegas Yon lantang.

Pemerintah sejak awal sudah punya tujuan jelas atas rencananya melakukan penataan ulang sistem PPN, baik dengan cara menaikkan tarif PPN, menerapkan multitarif dan tarif final, maupun mengurangi pengecualian dan fasilitas PPN. Tujuan paling utama ialah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penerapan tarif akan berbeda untuk barang yang bersifat mewah dan barang yang dibutuhkan masyarakat banyak. Selain itu, penataan PPN akan memberikan kemudahan dan kesederhanaan administratif.

Yon yang pernah menjabat sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak menjelaskan, kebijakan pemerintah tidak berdiri sendiri. Reformasi di bidang penerimaan

Penerapan tarif akan berbeda untuk barang yang bersifat mewah dan barang yang dibutuhkan masyarakat banyak.

merupakan satu paket kebijakan dengan reformasi di bidang belanja. Keduanya berjalan paralel.

“Kalau ada tambahan penerimaan yang cukup signifikan dari perubahan regulasi ini, kita bisa gunakan untuk dikembalikan lagi ke rakyat. Uangnya kita kembalikan kepada rakyat yang amat sangat terpuak selama pandemi, terutama desil 4 ke bawah orang miskin,” terang Yon. Ia menggarisbawahi, kebijakan penerimaan harus dilihat sebagai bagian yang utuh dari reformasi fiskal yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan bermuara menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa yang berlangsung 21 Juni 2021. Ia menyampaikan, APBN adalah dana anggaran yang berasal dari masyarakat melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta akan kembali lagi kepada masyarakat.

Menkeu menjelaskan, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat salah satunya isu PPN akan dibahas dengan DPR sebagai proses legislasi yang proper sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

RUU KUP yang sedang diajukan ke DPR adalah sebuah inisiatif gotong royong untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia.



APBN adalah dana anggaran yang berasal dari masyarakat melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta akan kembali lagi kepada masyarakat.

RUU KUP merupakan satu bagian dari reformasi yang sedang dilakukan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik.

Selain meningkatkan penerimaan negara sehingga tujuan mengembalikan defisit APBN ke angka 3 persen pada tahun 2023 tercapai, RUU KUP juga berupaya membuat sistem pajak yang lebih adil. Pemerintah dan DPR akan membahasnya terlebih dulu hingga mencapai keputusan terbaik untuk masyarakat.

“Ini adalah fondasi bagi ekonomi Indonesia. Tidak hanya hari ini, tetapi ke depan. Dan asas-asas keadilan, bagaimana tantangan-tantangan kita hari ini ke depan, nanti akan kita bahas secara bersama,” tegas Menteri Keuangan.

Semakin transparan prosesnya, semakin dilihat oleh semua pihak, menurut Menkeu akan semakin baik. Ia berharap proses pembahasan nantinya berlangsung baik. Namun, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. “Dari semua

anggaran yang kita lakukan hari ini, *policy-policy* adalah untuk memperkuat dan memulihkan ekonomi dan penanganan COVID-19,” tegasnya.

Optimistis *tax ratio* naik

“Kita optimistis dengan berbagai reformasi menyeluruh ini, mudah-mudahan *tax ratio* kita meningkat,” ujar Yon.

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Saat ini, *tax ratio* Indonesia memang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Namun, Yon menjelaskan, perlu diperhatikan bahwa definisi *tax ratio* yang digunakan oleh masing-masing negara belum tentu sama.

Sebagai contoh, Indonesia tidak memperhitungkan komponen pajak daerah sebagai bagian dari *tax ratio*, padahal total penerimaan pajak daerah Indonesia pada 2020 mencapai Rp250 triliun atau sekitar 1,6 persen dari PDB. Selain itu, negara lain memasukkan *Social Security Contribution (SSC)* dalam komponen *tax ratio*-nya, sedangkan Indonesia tidak memiliki komponen tersebut.

“Kalau kita memasukkan komponen pajak daerah, kita masih di bawah, tetapi tidak terlalu jauh,” ungkap Yon. Dengan perbaikan administrasi, perbaikan metodologi pengawasan, pemeriksaan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, dan perbaikan kebijakan secara paralel, Yon yakin *tax ratio* bisa naik cukup signifikan.

Ia menyampaikan sejumlah upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Selain memperkuat sistem pemungutan PPN, langkah lain yang dilakukan yakni membawa sektor informal ke dalam sistem perpajakan.

“PDB kita 60 persen berasal dari sektor UMKM. Karena basisnya informal, pemajakannya menjadi sulit. Mereka berdagang informal, *cash basis*, tidak membuat pembukuan, dan tidak menjadi sasaran utama bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan. Jadi, struktur ekonomi yang seperti itu memang cukup menantang,” Yon berpendapat.

Upaya peningkatan kepatuhan pajak lainnya dilakukan dengan mengenalkan program peningkatan kepatuhan pajak seperti pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Pertama, melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta Pengampunan Pajak. Kedua, melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2019.

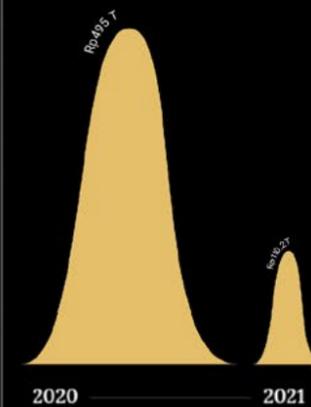
“Kita memberi kesempatan *volunteer* mengungkapkan penghasilan yang selama ini belum disampaikan dan tidak kita kenakan sanksi. Secara paralel, kita lakukan peningkatan pengawasan, tetapi bagi Wajib Pajak yang ingin *voluntary*, kita siapkan juga jalannya. Kebijakan ini sifatnya temporer, bukan kebijakan yang permanen,” pungkash Yon.



Melindungi yang Rentan Melalui Perlinsos

Ketidakpastian yang masih membayangi situasi global dan tanah air akibat pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus senantiasa sigap dan peka mengantisipasi kerentanan sosial sebagai dampak dari pandemi. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan untuk tetap melanjutkan program perlindungan sosial atau perlinsos di tahun 2021 ini. Apa saja yang sudah dan akan diberikan pemerintah melalui program perlinsos ini?

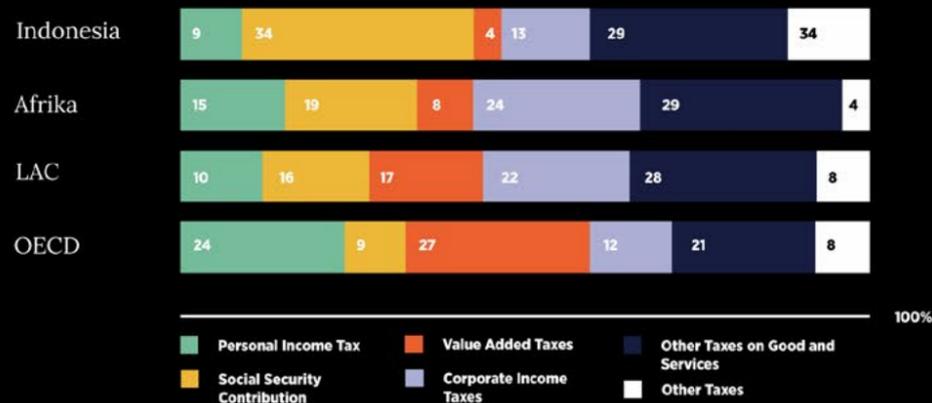
Anggaran Perlinsos



Pajak untuk Keadilan

Pemerintah terus memikirkan bagaimana kebijakan pajak dapat menciptakan keadilan yang lebih baik bagi seluruh segmen masyarakat. Tarif pajak PPN misalnya, saat ini masih bersifat tarif tunggal. Namun, sesungguhnya setiap jenis barang memiliki perbedaan-perbedaan harga, yang biasanya juga mencerminkan perbedaan kualitas dan/atau perbedaan kemewahan. Padahal, PPN berperan strategis dalam menopang penerimaan negara. Idealnya, kebijakan pajak menciptakan keadilan; pengenaan pajak bagi yang mewah dan pembebasan pajak bagi masyarakat kebanyakan.

Kontribusi PPN Sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah PPh (2018)



Perbandingan Tarif PPN (GST/Consumption Tax) di dunia:

Beberapa jenis PPN (Goods and Services Taxes) di dunia berdasarkan jenis obyek

Pajak atas sembako di berbagai negara:

- Perancis mengenakan tarif 10% untuk farm product,
- Austria mengenakan tariff 13% untuk agricultural supplies,
- Italia mengenakan tarif 10% untuk livestock meat and fish,
- Turki mengenakan tarif 8% untuk basic food.

Pajak atas jasa pendidikan di negara-negara lain:

- Vietnam mengenakan tarif 5% untuk educational and vocational training,
- Singapura mengenakan tarif 7%,
- China mengenakan tarif 6% untuk lifestyle services (education; healthcare; travel; entertainment; food and beverage; accommodation; citizens daily services; and cultural and sports services).

Pajak atas jasa pelayanan kesehatan di beberapa negara:

- Vietnam mengenakan tarif 5% untuk Health services, veterinary medicine services, including medical examination and treatment services for humans and animals,
- China mengenakan tarif 3%, 5%, 6%, dan 9%,
- Singapura mengenakan tarif 7%,
- Thailand mengenakan tarif 7% untuk services in medical treatment dan medical service of health institution under the law governing such health

Beraksi Dengan Konservasi Ikan

Teks Resha Aditya Foto Dokumentasi Pribadi

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi termasuk jenis hiu dan pari. Namun, Indonesia juga menjadi ancaman sebagai produsen hiu dan pari terbesar di dunia. Muhammad Ichsan merupakan *awardee* LPDP yang terjun langsung di bidang konservasi hiu dan pari. Pemuda yang mengambil S2 bidang Konservasi Biologi di University of Queensland ini berjuang untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya menjaga kelestarian hiu dan pari di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Simak perbincangan Media Keuangan berikut ini.

Apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi peneliti hiu dan pari?

Menurut data dari Food and Agricultural Organization (FAO), Indonesia memiliki rata-rata produksi tahunan Indonesia pada kurun waktu 2000-2011 mencapai 106.034 ton atau sekitar 13 persen dari total tangkapan

global. Besarnya potensi dan ancaman terhadap keberlangsungan hiu dan pari Indonesia, mendorong saya untuk mengetahui lebih banyak mengenai hiu dan pari, apalagi jenis ikan ini masih belum banyak diteliti dibandingkan jenis ikan lainnya.

Bagaimana Anda bisa terjun ke dunia konservasi hiu dan pari?

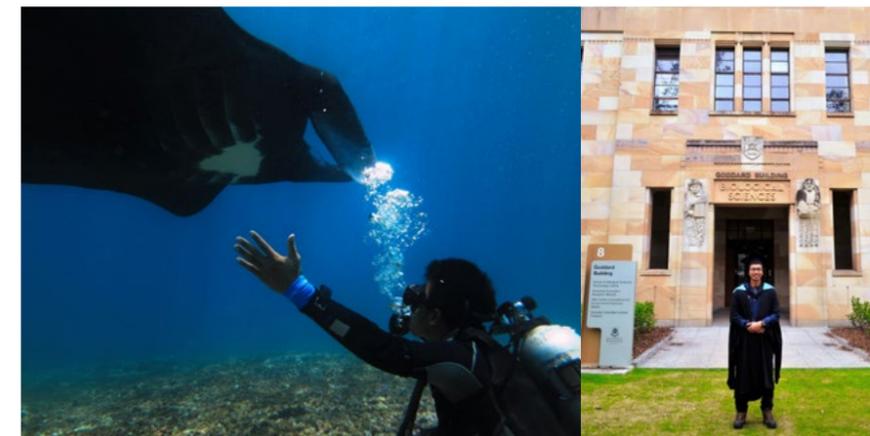
Awal mula saya terjun ke dunia konservasi hiu dan pari ketika saya mengikuti program *internship* dari MantaWatch UK di Taman Nasional Komodo. Dari program inilah saya mengenal lebih banyak mengenai konservasi laut. Setelah lulus S1, saya bekerja sebagai pemandu selam dan peneliti hiu bersama Sharkdiving Indonesia di Morotai Maluku Utara. Di sana saya meluangkan waktu untuk mengikuti proses seleksi LPDP dan berangkat ke Australia pada tahun 2015. Kemudian saya bekerja untuk Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Setelah lulus kuliah dari Australia. Di WCS Indonesia, saya memperdalam pengetahuan dan pengalaman saya mengenai konservasi hiu dan pari. Yang menarik perhatian saya, sebelum penangkapan besar-besaran hiu dan

pari beberapa dekade terakhir, saya menyadari bahwa hiu dan pari telah turun-temurun dimanfaatkan secara tradisional dan menjadi bagian dari budaya oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hiu dan pari saat ini dituntut menggunakan pendekatan holistik dari berbagai ilmu, tidak hanya dari segi perikanan, biologi dan lingkungan saja namun juga harus didukung dari berbagai aspek keilmuan lain seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

Setelah tidak lagi bersama WCS Indonesia, saya tetap aktif melakukan beberapa kegiatan konservasi hiu dan pari sebagai *fellow* di Zoological Society of London (ZSL) EDGE of Existence Programme. Selain itu, bersama istri saya yang satu profesi, kami pun membuat *platform online* bernama Elasma Initiative Indonesia. Platform ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hiu dan pari di Indonesia juga secara global. Diharapkan dengan narasi dan informasi yang mudah dicerna lewat platform ini, akan semakin banyak generasi muda yang tergerak untuk melakukan usaha konservasi laut terutama hiu dan pari.

Apa yang membuat Anda tertarik mendaftar beasiswa LPDP?

Basiswa LPDP tidak hanya dapat mendukung studi saya namun juga dapat menekankan nilai-nilai nasionalisme dan pengabdian. Yang paling berkesan dari saya adalah ketika melakukan proses pendaftaran beasiswa dan memenuhi persyaratan secara daring dari Morotai dengan berbagai keterbatasan. Berbekal tekad, saya jalani prosesnya dimulai dari mengerjakan berbagai tugas yang diberikan, pulang dan pergi ke Jakarta dari Morotai untuk proses wawancara hingga mengikuti Persiapan Keberangkatan (PK). Pada saat mengikuti PK saya sangat termotivasi dengan berbagai kegiatan dan narasumber yang mumpuni. Di



setiap langkah juga ditanamkan rasa nasionalisme dan kebersamaan yang saya bawa terus hingga sekarang.

Apa yang membuat Anda tertarik studi ke S2 ke University of Queensland Australia?

Untuk bidang konservasi laut, Australia merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang sangat tinggi. University of Queensland merupakan salah satu yang terbaik di bidang ini. Beberapa ahli yang dulu hanya bisa saya lihat namanya di tulisan ilmiah internasional, bisa saya temui dan saya ajak diskusi secara langsung. Untuk soal fasilitas juga sangat lengkap, sebut saja *Heron Island Research Station* yang terletak di tengah pulau di *Great Barrier Reef*, gugusan terumbu karang terbesar di dunia. Di stasiun penelitian ini bisa ditemui laboratorium kelautan yang mumpuni dan beberapa langkah dari stasiun penelitian kami sudah bisa berenang bersama hiu dan penyu di

antara terumbu karang.

Apa pesan Anda bagi anak muda Indonesia yang sedang berjuang meraih cita-cita?

Diawali oleh keinginan yang kuat, doa dan konsistensi semua mimpi bisa diraih. Menempuh pendidikan lebih tinggi bukan tujuan akhir namun merupakan jalan untuk cita-cita yang lebih besar. Cita-cita yang besar tentunya harus berguna bagi orang lain, bangsa, agama dan juga alam. Temukanlah relungmu dan jawablah panggilan hatimu, berusahalah dengan sepenuh hati dan jangan pernah menyerah pada nasib dan keadaan. Jadilah pembelajar seumur hidup, belajarlah dimanapun, kapanpun dan pada siapapun bahkan pada ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan bermacam bentuk dan rupa. Sesuai kata pepatah Minangkabau "Alam takambang jadi guru".



Merawat Sukacita di Yamdena

Teks Aditya Wirananda Foto Dok. KPPN Saumlaki

Saumlaki adalah sebuah kota di ujung selatan pulau Yamdena. Kota ini merupakan ibu kota dari kabupaten Kepulauan Tanimbar, provinsi Maluku. Letaknya sekitar 3.500 kilometer di sebelah timur Jakarta, dan sekitar 500 kilometer di sebelah utara Darwin, Australia.

Jarak yang tidak ringkas

Pulau Yamdena, tempat Saumlaki berada, adalah pulau terbesar di wilayah Kepulauan Tanimbar. Untuk menuju ke sana, kita harus menuju Ambon lebih dulu. Sebab penerbangan menuju Saumlaki hanya ada dari Ambon. Itupun sehari hanya ada satu kali jadwal penerbangan. Dari Ambon, kita perlu terbang selama satu setengah jam untuk sampai di Saumlaki.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Sudi Bawa Suwita mengatakan bahwa kantor ini sudah beroperasi sejak 1983, kendati dengan nomenklatur yang berubah-ubah. “1983 dulu namanya masih KPN (Kantor Perbendaharaan Negara), kemudian tahun 1990 berubah menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara), kemudian tahun

2009 menjadi KPPN,” ujarnya. Secara organisasi, kantor ini juga cukup ramping. Untuk melayani 36 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar, kantor ini diperkuat 14 personel saja termasuk kepala kantor.

Wilayah kerja KPPN Saumlaki terbilang luas, yakni meliputi kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kabupaten Maluku Barat Daya sendiri beribukota di Tiakur, kota yang berbatasan langsung dengan Timor Leste di sebelah barat. Sudi mengatakan, satuan kerja di wilayah Maluku Barat Daya harus mengeluarkan usaha ekstra saat menghadiri acara yang digelar KPPN Saumlaki. “Itu perjalanannya juga agak menantang,” ujarnya. Mereka tak bisa langsung terbang menuju Saumlaki. Dari Maluku Barat Daya, mereka harus menuju Ambon terlebih dulu, menginap semalam, lalu terbang keesokan harinya menuju Saumlaki. Begitu pula saat personel KPPN Saumlaki akan menuju Maluku Barat Daya. Padahal jarak Maluku Barat Daya dan Saumlaki menuju Ambon lebih jauh daripada jarak Maluku Barat Daya ke Saumlaki.



Menyiasati tekanan

Kendala aksesibilitas tentu menjadi perkara batin tersendiri, lebih-lebih bagi mereka yang biasa menikmati keleluasaan akses di kota besar. Namun demikian, Sudi mengatakan personelnnya dalam kondisi yang mapan secara mental, kendati sebagian besar personelnnya masih berusia muda. “Pasti ada, kita kalau ditempatkan di wilayah yang jauh, yang *remote* itu kita pasti mengalami ‘shock’. Itu pasti, diakui atau tidak,” ujar pria kelahiran Tulungagung ini. Lebih-lebih, mayoritas pegawainya adalah pendatang dari wilayah pulau Jawa. Karena kesadaran itu, Sudi berupaya selalu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pegawainya bekerja dan berbagi. “Saya berusaha membuat diri saya sendiri dan teman-teman itu nyaman,” ujarnya.

Sudi mengatakan, salah satu upaya untuk membangun kenyamanan adalah dengan memastikan pegawai yang ditempatkan di wilayah Saumlaki mendapat tempat tinggal yang layak. “Misalnya kita punya rumah dinas, ya kita kondisikan rumah dinas itu nyaman. Supaya tidak ada beban tambahan. Sudah jauh penempatannya, rumah dinasny nggak ada, harus kos dan

lain sebagainya, itu saya yakin juga ada tambahan beban,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya lingkungan kantor dan tempat tinggal yang nyaman. Salah satu yang dapat menopang kenyamanan itu adalah ketersediaan internet. Sudi mengatakan, beruntungnya saat ini konektivitas internet di wilayah Saumlaki sudah cukup bagus. “Beberapa periode yang lalu, koneksi internet di Saumlaki memang termasuk yang kurang. Saat ini alhamdulillah sudah cukup bagus,” ia menambahkan.

Keberadaan internet yang memadai ini, menurut Sudi juga sangat memudahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Lebih-lebih, belakangan ini pola bekerja sudah mulai beralih ke digital. Peralihan itu setidaknya membuat kendala aksesibilitas tidak terlalu terasa bagi Sudi dan timnya.

Terakhir, ia berharap KPPN Saumlaki dapat berperan lebih baik terutama dalam proyek-proyek nasional yang ada di wilayah kerjanya. Salah satu proyek nasional yang terdapat di wilayah kerja Saumlaki saat ini adalah Blok Masela. Blok Masela adalah proyek eksplorasi minyak dan gas di wilayah Pulau Masela, kabupaten Maluku Barat Daya.

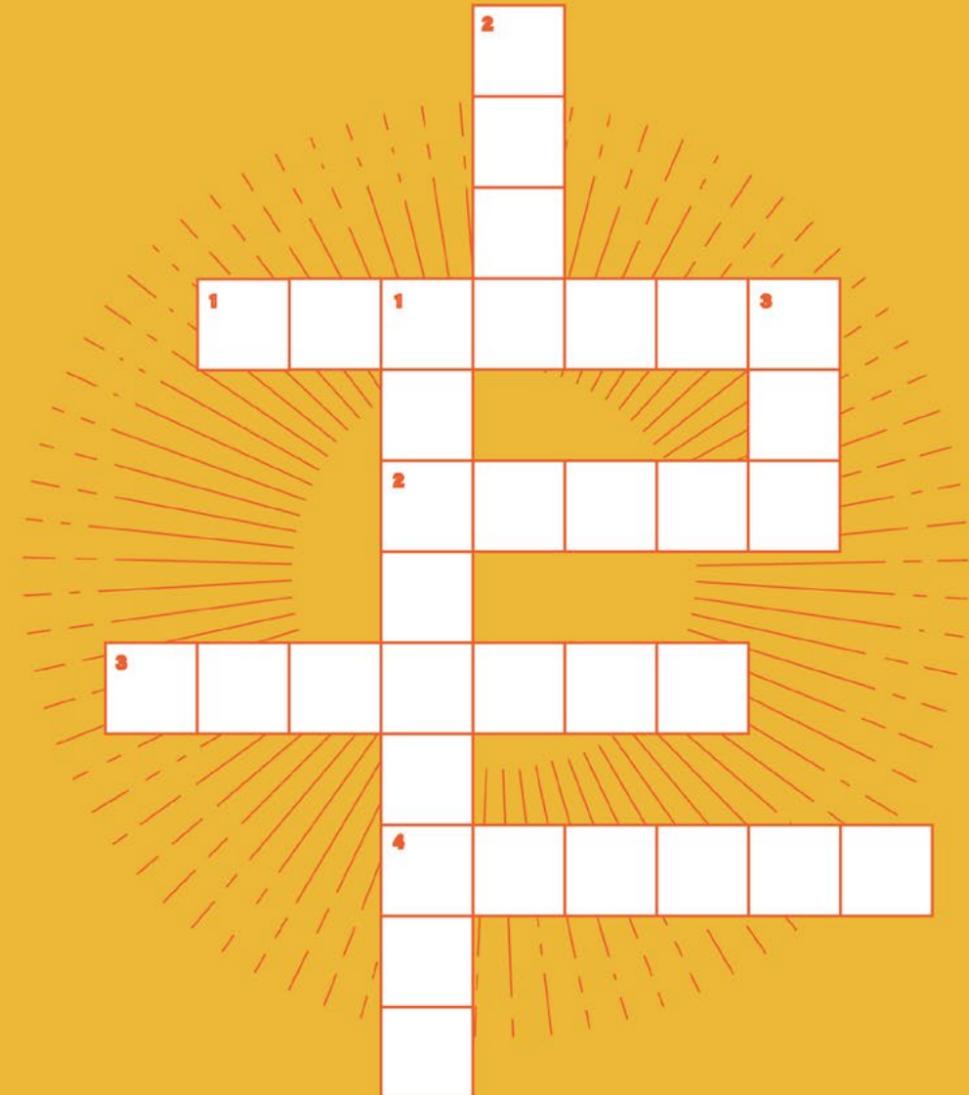


JERAT NARKOBA

langsung menyerang otak,
tak ada jaminan sembuh!



tekateki.



Mendatar:

1. Pulau terbesar di kepulauan Tanimbar
2. Dekat, intim, perihal teman
3. Instrumen utang dengan jaminan berupa aset properti
4. Keras sekali, tentang suara

Menurun:

1. Blog dengan panjang terbatas
2. Transfer ke daerah dan dana desa
3. Asian Development Bank

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Hari Cokelat Sedunia

7 Juli 2021



Foto: iStock